

Pendampingan Sekolah Binaan Standar Penjaminan Mutu Internal LPMP Provinsi Kalimantan Timur

Soerjo Adi Poernomo^{1*}, Syafrudin Januar²

^{1,2}Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK

Maksud dari pengembangan Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Binaan dan imbasnya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi sekolah binaan dalam mengimplementasikan standar penjaminan mutu internal di sekolah mereka sehingga menjadi lebih bermutu. Kegiatan ini menggunakan metode In-On-In yang dilakukan secara daring dan luring. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah binaan membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan adanya pelaksanaan standar penjaminan mutu diharapkan satuan pendidikan dapat memenuhi standar yang masih lemah atau masih belum memenuhi standar nasional pendidikan dan atau bahkan melampaui.

ABSTRACT

The purpose of developing the Internal Quality Assurance Standard for the Targeted Schools and their impact is to improve the quality of education by national education standards and to create a culture of quality education in the education unit. This community service activity aims to assist the target schools in implementing internal quality assurance standards in their schools so that they become more qualified. This activity uses the In-On-In method which is carried out online and offline. The results of this activity indicate that the implementation of the internal quality assurance system in the target schools requires the cooperation of all parties. With the implementation of quality assurance standards, it is hoped that educational units can meet standards that are still weak or do not meet national education standards or even exceed them.

KATA KUNCI

Sekolah Binaan,
Standar Penjaminan
Mutu Internal,
Lembaga
Penjaminan Mutu
Pendidikan

KEYWORDS

*Supported Schools,
Internal Quality
Assurance
Standards,
Education Quality
Assurance
Institutions*

Pendahuluan

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan (Fadhli, 2017) disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan (Kusnandi, 2017).

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut Sekolah Binaan SPMI, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia (Yasin, 2021).

CONTACT: Soerjo Adi Poernomo  soerjo.adi@kemdikbud.go.id

© 2022 The Author(s). Published with license by Lighthouse Publishing.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



Maksud dari pengembangan Sekolah Binaan SPMI dan imbasnya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah Binaan SPMI diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Dalam mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan Sekolah Binaan SPMI melalui penyiapan fasilitator pengembangan Sekolah Binaan SPMI, workshop atau pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk Sekolah Binaan SPMI, pendampingan Sekolah Binaan SPMI dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi Sekolah Binaan SPMI.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lorensius, Warman, Silpanus, et al., 2021).

Konsep MBS pertama muncul dan dilaksanakan di Amerika Serikat. Kemunculan MBS karena adanya tuntutan masyarakat yang menanyakan tentang relevansi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat itu, terkait dengan kinerja sekolah yang dianggap tidak mampu mengantarkan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha. Dengan kata lain, sekolah dianggap tidak dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif secara global. Fenomena ini di respon dengan reformasi terhadap manajemen sekolah, yang kemudian secara umum dikenal dengan *school-based management* (Lorensius, Warman, & Tresia, 2021).

Secara konseptual MBS merupakan strategi dan model yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang dikatakan Firdianti (2018) MBS merupakan strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengalihkan kewenangan pembuatan keputusan dari pusat kepada sekolah. Namun dalam konteks Indonesia penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi, karakter, dan budaya bangsa Indonesia. Sejumlah ahli pendidikan menyatakan bahwa pemberian otonomi kekuasaan kepada sekolah tidaklah menjamin bahwa sekolah akan menggunakan wewenang yang diperolehnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, sekolah sebagai pelayan harus dapat membuat keputusan bersama tentang layanan pendidikan yang diharapkan (Lorensius & Ping, 2021)

Otonomi sekolah memiliki arti bahwa sekolah mempunyai kewenangan dan kemandirian dalam mengatur dirinya sendiri, sesuai undang-undang pendidikan nasional. Kemandirian tersebut, didasarkan atas: kemampuan sumber daya manusia yang ada, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menghargai perbedaan pendapat, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri. Cahyana (2010) mengidentifikasi kewenangan yang dapat dilakukan sekolah, yaitu: (1) penerimaan siswa, (2) mengembangkan teknik pengukuran dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, (3) mengambil keputusan tentang data-data performant sekolah yang dapat dipublikasikan, dan (4) biaya pendidikan. Kemandirian sekolah tidak berarti sekolah memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi harus mengikuti pula tujuan pendidikan nasional dan standar mutu minimal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Ridwan & Sumirat, 2021).

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina Sekolah Binaan SPMI agar dapat mengimplementasikan SPMI, menyusun dokumen mutu sesuai dengan indikator mutu, dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar pada satuan Pendidikan, sebagai media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di Sekolah Binaan SPMI (Siagian et al., 2022). Berdasarkan uraian di atas, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk (1) memfasilitasi materi pendampingan sekolah binaan LPMP Provinsi Kalimantan Timur berupa Implementasi SPMI di satuan pendidikan, penyusunan dokumen mutu sesuai dengan indikator mutu, dan implementasi kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan; (2) memfasilitasi kegiatan program

pendampingan sekolah binaan SPMI LPMP Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan skenario pembelajaran.

Metode

Dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, LPMP berperan untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Eksternal (SPME).

Untuk memperkuat pelaksanaan SPMP tersebut, LPMP perlu melaksanakan Pendampingan Sekolah Model *in Service Training*, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu:

- Mampu memahami mekanisme pelaksanaan SPMI;
- Mampu melaksanakan SPMI di sekolah
- Mampu menyusun rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan memberikan solusi bagi permasalahan sekolah, dan;
- Mampu memahami pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran

Adapun yang berperan sebagai fasilitator yaitu Widyaiswara, struktural, staf dan pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan tingkat nasional, pelatihan tingkat daerah, tingkat Provinsi, dan pelatihan SPMI untuk pengawas.

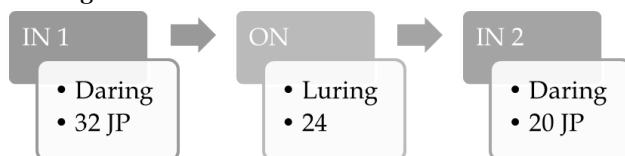
Sosialisasi pemanfaatan rumah belajar menjadi salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan pendampingan sekolah model *in service training*. Di zaman serba online sekarang ini, di mana hampir semua orang mempunyai gadget, portal Rumah Belajar hadir untuk menjadi solusi bagi pembelajaran yang lebih baik ke depannya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Keberadaan Rumah Belajar dianggap sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, sehingga sosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar terus dilakukan.

Melalui pendampingan sekolah model yang dilaksanakan di 30 TPK dengan sasaran 200 sekolah model di 10 kabupaten/kota orang, yang terdiri dari unsur pengawas pembina, kepala sekolah, dan guru untuk setiap sekolah (setiap sekolah terdiri dari 5 peserta). Diharapkan secara keseluruhan 1000 peserta dapat hadir dalam kegiatan pendampingan sekolah model *in service training* dan dapat memahami seluruh materi yang disampaikan, termasuk dapat memanfaatkan rumah belajar secara lebih baik untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

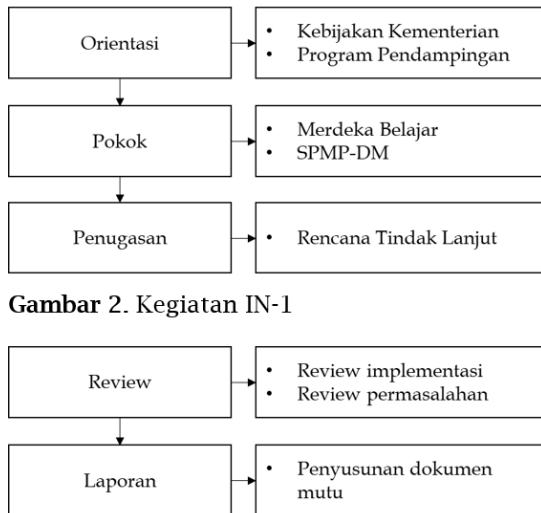
Hasil dan Pembahasan

Program Pendampingan

Pola Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang akan dilaksanakan pada sekolah binaan selama 4 Minggu pada bulan Juni 2021. Materi ini membahas tentang pengertian SPMI menurut Permendikbud 28 Tahun 2016, siklus SPMI mulai dari pemetaan mutu berdasarkan hasil rapor mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan monitoring evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan mengikuti pola dan alur sebagai berikut:

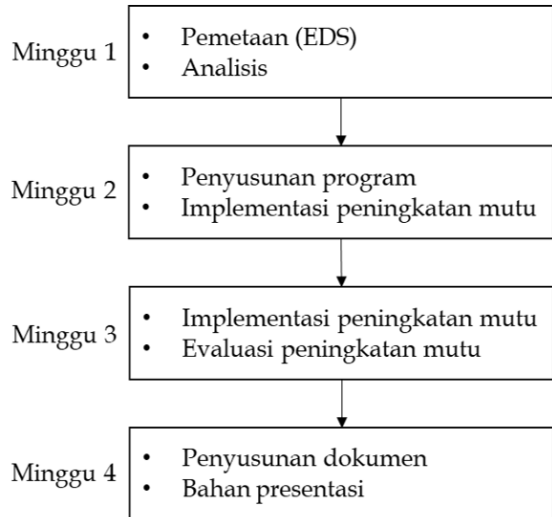


Gambar 1. Pola Pendampingan Sekolah Binaan



Gambar 2. Kegiatan IN-1

Gambar 4. Kegiatan IN-2



Gambar 3. Kegiatan ON

Materi

Adapun materi yang diberikan yakni (1) Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan; membahas tentang implementasi empat kebijakan materi belajar di satuan pendidikan yaitu ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)., dan (2) Penyusunan Dokumen Mutu sesuai Indikator Mutu; materi ini membahas tentang penyusunan dokumen mutu yang berdasarkan pada delapan standar nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Berikut ini adalah struktur program sekolah binaan yang diselenggarakan:

Tabel 1. Struktur Program Pendamping Sekolah Binaan (IN-1)

No	Materi	Waktu (32 JP)
1.	Kebijakan Program Sekolah Binaan	2
2.	Penguatan Implementasi SPMI	8
3.	Penyusunan Dokumen Mutu sesuai dengan Indikator Mutu (8 SNP)	15
4.	Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan	7

Implementasi merupakan penjabaran keputusan strategis ke keputusan operasional. Hal-hal yang menghambat keberhasilan implementasi suatu program kerja yaitu: kurangnya kepemimpinan, tidak tepatnya struktur organisasi, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan tidak berjalannya sistem operasional utama pendukung strategi.

Tabel 2. Struktur Program Sekolah Binaan (ON)

No	Materi	Waktu (32 JP)
1.	Implementasi SPMI <ol style="list-style-type: none"> Pemetaan Mutu (evaluasi diri sekolah) Perencanaan pemenuhan mutu Pelaksanaan pemenuhan mutu Monitoring dan evaluasi 	8
2.	Review dan Penyusunan Dokumen Mutu <ol style="list-style-type: none"> Standar SKL Standar Isi Standar Proses 	8

No	Materi	Waktu (32 JP)
	d) Standar Penilaian	
	e) Standar PTK	
	f) Standar Sarana dan Prasarana	
	g) Standar Pengelolaan	
	h) Standar Pembiayaan	
3.	Penyusunan Dokumen Mutu sesuai Indikator Mutu	8
	a) Kebijakan USBN	
	b) Kebijakan UN	
	c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	
	d) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	

Tabel 3. Struktur Program Sekolah Binaan (IN 2)

No	IN-2	Waktu (20 JP)
1.	Review Permasalahan Implementasi SPMI	2
2.	Review Dokumen Mutu sesuai Indikator Mutu	
	a) Standar SKL	2
	b) Standar Isi	2
	c) Standar Proses	2
	d) Standar Penilaian	2
	e) Standar PTK	2
	f) Standar Sarana dan Prasarana	2
	g) Standar Pengelolaan	2
	h) Standar Pembiayaan	2

Langkah Kerja:

Topik Umum

- 1) Fasilitator memberi salam dan menanyakan kabar peserta serta memperkenalkan diri secara singkat (5').
- 2) Peserta menyimak paparan Pengantar Kebijakan Program Pendampingan Sekolah Binaan (35').
- 3) Fasilitator membuka forum diskusi dan tanya jawab dengan peserta (15').
- 4) Fasilitator mengakhiri sesi dan menyiapkan bahan paparan selanjutnya.

Topik Pokok

Kegiatan yang dilakukan Penguatan Implementasi SPMI:

- 1) Penguatan Implementasi SPMI Durasi terdiri atas 8 JP Media, buku pegangan pembekalan pendamping
- 2) Dokumen Regulasi yang terkait antara lain bahan presentasi, lembar kegiatan dan Implementasi SPMI. Kemudian rubrik hasil kajian,
- 3) Penyusunan Dokumen Mutu sesuai dengan indikator mutu durasi 15 JP.
- 4) Kemudian media yang digunakan terdiri atas buku pegangan pembekalan pendamping. Selanjutnya dokumen regulasi yang terkait bahan presentasi terdiri dari pembuatan lembar kerja (LK).

Rubrik Hasil Kajian terdiri atas langkah-langkah:

- 1) Fasilitator menyampaikan secara singkat tentang materi diklat, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran,
- 2) Peserta menyimak paparan materi tentang 8 SNP beserta indikator dan sub indikatornya sambil diselingi dengan tanya jawab,
- 3) Peserta menyimak paparan fasilitator tentang cara mengetahui ketercapaian mutu 8 SNP melalui implementasi SPMI dan SPME, dengan menekankan pada tahap Verval dalam SPMI dan SPME yang dilakukan melalui Observasi, Studi Dokumen Mutu dan Wawancara.

- 4) Fasilitator melakukan tanya jawab dengan peserta tentang pengertian, fungsi dan jenis dokumen mutu Pendidikan.
- 5) Persiapan kunjungan ke sekolah untuk melaksanakan praktik menganalisis ketersediaan dokumen mutu di sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Peserta dibagi ke dalam 8 kelompok, dengan jumlah anggota/kelompok disesuaikan dengan jumlah seluruh peserta. 2) Masing-masing kelompok diminta memilih Ketua dan Sekretaris kelompok. 3). Kepada masing-masing kelompok dibagikan LK-2.a - LK-2.h (masing-masing kelompok satu standar SNP), kemudian Ketua Kelompok dibantu Sekretaris, diminta mengkaji tentang kesesuaian LK tersebut dengan Indikator, Sub Indikator dan Bukti Fisik Dokumen yang terdapat pada Buku Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Dikdasmen dan Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah beserta Juknisnya. 4) Fasilitator meminta kritik/saran/masukan/pertanyaan dari masing-masing kelompok terkait dengan Petunjuk dan Isi dari lembar kerja.
- 6) Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok (d disesuaikan dengan jumlah peserta) dengan anggota 8 orang/kelompok, di mana setiap kelompok tersebut terdapat satu orang yang telah mengkaji Lembar kerja.
- 7) Masing-masing kelompok diminta mempersiapkan diri menuju Sekolah/Madrasah yang telah dihubungi dan disiapkan oleh Panitia sebagai tempat praktik melakukan kegiatan menganalisis ketersediaan Dokumen Mutu, dengan mengerjakan lembar kerja.
- 8) Masing-masing kelompok didampingi oleh satu atau dua orang Fasilitator/Panitia menuju kendaraan untuk menuju Sekolah/ Madrasah sebagai tempat praktik yang telah ditentukan.



Gambar 5. Diskusi dalam Pendampingan Sekolah Binaan SPMI



Gambar 6. Pendampingan Sekolah Binaan SPMI

Kegiatan ON peserta di sekolah adalah sebagai berikut:

1) Temu Awal

Dilaksanakan di satu ruangan dan berkumpul antara kepala sekolah, dewan guru, staf, peserta praktik serta pendamping antara lain:

- a) memperkenalkan dirinya dan semua anggota kelompoknya,
- b) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yakni: akan melaksanakan praktik menganalisis ketersediaan Dokumen Mutu berdasarkan indikator dan sub indikator 8 SNP dan membantu sekolah/madrasah untuk menyusun Dokumen Mutu tersebut, dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.
- c) menjelaskan bahwa cara kerja mereka nanti sudah dibagi ke dalam kegiatan: Temu awal, Praktik dan Temu Akhir, di mana untuk kegiatan praktik nantinya satu orang di antara mereka akan menganalisis dan membantu menyusun satu standar, sesuai tugas/LK yang telah dibagi sebelumnya,
- d) memohon Kepsek dan para guru/staf yang telah ditunjuk dapat membantu sedemikian rupa agar tugas kelompok ini dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien.

2) Kerja Praktik:

Masing-masing peserta dibantu guru/staf di sekolah/madrasah yang telah ditunjuk, bekerja menganalisis ketersediaan Dokumen Mutu dan membantu menyusun dokumen tersebut, sesuai standar SNP (LK) yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Temu Akhir:

Dilaksanakan di satu ruangan dan berkumpul antara Kepsek, dewan guru, staf, peserta praktik serta pendamping. a) Ketua kelompok mempersilakan anggotanya secara berurutan sesuai 8 SNP, dimulai dari SKL dan diakhiri Standar Pembiayaan, untuk menyampaikan secara singkat hasil temuan dan saran. b) Kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas bantuan dan saran-sarannya dan berharap sekolah/madrasah lebih siap menghadapi akreditasi sehingga hasilnya memuaskan, dan memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, serta mengucapkan selamat jalan bila nanti kembali ke LPMP Kaltim. c) Ketua kelompok mengucapkan terima kasih atas segala sambutan, bantuan dan kerjasamanya, memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dan mohon pamit untuk kembali ke LPMP Kaltim. d) Dengan bersalam-salaman antara peserta dan pendamping dengan Kepsek, dewan guru/staf, peserta menuju kendaraan untuk kembali ke LPMP Kaltim.



Gambar 7. Kegiatan ON Peserta di Sekolah

Simpulan

Implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah binaan tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan SPMI. Warga sekolah harus tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu dan melaksanakan SPMI secara berkelanjutan, dan dinas pendidikan serta pemerintah sebagai pihak eksternal harus memberikan dukungan serta melakukan pendampingan secara berkala terhadap peningkatan mutu di sekolah binaan melalui SPMI.

Sekolah binaan juga harus konsisten, dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan petunjuk teknis, serta perlu adanya peran komite dan seluruh stakeholder secara optimal dalam mendukung implementasi SPMI pada sekolah binaan. Dengan adanya pelaksanaan SPMI di setiap satuan pendidikan diharapkan satuan pendidikan dapat memenuhi standar yang masih lemah atau masih belum memenuhi standar nasional pendidikan dan atau bahkan melampaui. Dengan demikian, tujuan utama pelaksanaan kegiatan SPMI yaitu meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 109. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437>
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*. Lampung: Gre Publishing.
- Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 107-118.
- Lorensius, L., & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 1(2), 107-119.
- Lorensius, L., Warman, W., & Tresia, Y. (2021). Kajian Literatur: Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 118-131.
- Lorensius, Warman, W., Silpanus, S., & Ping, T. (2021). Leadership model and planning strategies in private Catholic colleges during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Studies in Social Sciences (IJESSS)*, 1(2), 49-60. <https://doi.org/10.53402/ijesss.v1i2.16>
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Siagian, B. A., Situmorang, S. N., Siburian, R., Sihombing, A., Harefa, R. Y. R., Ramadhani, S., & Sitorus, A. (2022). Sosialisasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Program Merdeka Belajar di SMP Gajah Mada Medan. *Indonesia Berdaya*, 3(2), 339-344.
- Yasin, I. (2021). Problem Kultural Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Total Quality Management. *Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan*, 2(3), 239-246.